

**KONTRIBUSI PENDAPATAN AGRIBISNIS KELAPA PADA
PENDAPATAN KELUARGA PETANI
DI KABUPATEN GORONTALO**

***INCOME CONTRIBUTION OF COCONUT AGRIBUSINESS TOWARD
FARMERS FAMILY'S INCOME IN GORONTALO REGENCY***

MOHAMAD IKBAL BAHUA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005**

**KONTRIBUSI PENDAPATAN AGRIBISNIS KELAPA PADA
PENDAPATAN KELUARGA PETANI
DI KABUPATEN GORONTALO**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Manajemen Agribisnis

Disusun dan diajukan oleh

MOHAMAD IKBAL BAHUA

KEPADA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2005

TESIS

KONTRIBUSI PENDAPATAN AGRIBISNIS KELAPA PADA PENDAPATAN KELUARGA PETANI DI KABUPATEN GORONTALO

Disusun dan diajukan oleh

MOHAMAD IKBAL BAHUA

Nomor Pokok P 1000203528

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 23 Agustus 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Prof. DR. Ir. Hj. Farida Nurland, M.S

Ketua

DR. Ir. M<ahludin H. Baruwadi, M.P

Anggota

Ketua Program Studi
Agribisnis,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin.

Dr. Ir. Rahim Darma, MS

Prof.Dr.Ir. Natsir Nessa, MS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Ikbal Bahua
Nomor Mahasiswa : P1000203528
Program Studi : Manajemen Agribisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2005

Yang menyatakan

Mohamad Ikbal Bahua

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan izin-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Program Studi Manajemen Agribisnis.

Sebagai tanda bakti dan syukur penulis mempersembahkan tesis ini kepada Ayahanda tercinta Hamzah Bahua dan Ibunda tercinta Nurhaida Takuwa yang telah mendidik dan membesarkan penulis, sehingga penulis dapat mengikuti program pascasarjana (S-2) di Universitas Hasanuddin Makassar. Sebagai ungkapan kasih sayang tesis ini penulis persembahkan kepada isteri tercinta Heni Jusuf dan anakda tersayang Arliawan Safriansyah Pratama Bahua yang dengan penuh pengorbanan, kesabaran serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Farida Nurland, M.S selaku ketua tim pembimbing dan Bapak Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku anggota tim pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing dan menambah wawasan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penyusunan tesis sesuai waktu yang telah ditentukan dan semua arahan dari tim pembimbing tesis ini adalah merupakan nilai harga dari Ilmu Pengetahuan yang tidak akan pernah dilupakan penulis sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai tim penguji yaitu : Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Natsir Nessa, M.S, Ibu Dr. Indrianty Sudirman, SE, M.Si serta Bapak Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum. yang telah banyak memberikan arahan, tanggapan dan perbaikan kearah sempurnanya tesis ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dan segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pengetahuan di Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada Ketua Program Studi Manajemen Agribisnis Bapak Dr. Ir. Rahim Darma, M.S dan Sekretaris Program Studi Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan studi serta turut mempercepat proses pelaksanaan studi dari penulis.

Sebagai ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis dalam menempuh studi S2 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo. Dan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo beserta jajarannya serta segenap adik-adik

mahasiswa penulis menyampaikan terima kasih atas segala motivasi dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan studi.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan bantuan dana pendidikan, penelitian serta penyelesaian penyusunan tesis selama penulis menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian di Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Bongomeme.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Abdul Djabbar Bahua dan Bapak Ir. Zulzain Ilahude, M.P. yang telah banyak membantu penulis baik dalam bentuk moril maupun materi, sehingga penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kepada teman-teman mahasiswa pascasarjana program studi manajemen agribisnis angkatan tahun 2003 penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan sampai pada proses pelaksanaan penelitian serta penyusunan tesis.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kakanda tercinta Yacob Zainal Bahua, S.Pd beserta isteri Kristine Kaung, Adik Astery Poppy Bahua bersama suami Syafrudin Mahmud, Bastian Tito Bahua bersama isteri Desrianty Puhi, yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Kepada Ibunda mertua penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa dan kasih sayangnya sehingga penulis tetap tabah dalam menyelesaikan studi.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Semoga bantuan yang telah diberikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah, SWT.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan oleh karena itu saran dan kritiknya sangat diharapkan untuk penyempurnaan tesis ini, karena tidak ada gading yang tak retak. Tak ada karya manusia yang sempurna benar, semoga tesis ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan pertanian dimasa depan.

Makassar, Agustus 2005

Penulis

ABSTRAK

MOHAMAD IKBAL BAHUA. *Kontribusi Pendapatan Agribisnis Kelapa Pada Pendapatan Keluarga Petani Di Kabupaten Gorontalo. (dibimbing oleh Farida Nurland dan Mahludin H. Baruwadi).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) besarnya kontribusi pendapatan dari usahatani kelapa terhadap pendapatan keluarga petani, (2) distribusi pendapatan keluarga petani kelapa berdasarkan sumber-sumber pendapatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dengan mewawancarai seratus orang petani kelapa sebagai responden. Responden dipilih secara acak sederhana pada empat desa, yaitu dua desa di Kecamatan Batudaa dan dan dua desa di Kecamatan Bongomeme yang mewakili lokasi penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis proporsi dan analisis Gini Ratio.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kontribusi pendapatan keluarga petani yang berasal dari usahatani kelapa lebih tinggi daripada sumber pendapatan lainnya yaitu sebesar 53.6 % atau 4.77 juta rupiah per tahun (2.62 juta rupiah/ha). Tingginya kontribusi tanaman kelapa terhadap pendapatan keluarga petani disebabkan oleh tanaman kelapa menyebar pada setiap wilayah di kabupaten Gorontalo, ramah terhadap lingkungan dan memiliki surplus tenaga kerja. Nilai koefisien Gini untuk pendapatan yang berasal dari kelapa sebesar 0,364, untuk pendapatan keseluruhan usahatani sebesar 0,329, sedangkan untuk seluruh pendapatan non usahatani 0,275. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan di luar usahatani kelapa telah memperbaiki distribusi pendapatan keluarga petani kelapa.

ABSTRACT

MOHAMAD IKBAL BAHUA. *Income Contribution of Coconut Agribusiness Toward Farmers Family's Income in Gorontalo Regency* (supervised by Farida Nurland and Mahludin H. Baruwadi).

This research aimed to know the amount of income contribution from coconut farming enterprise toward the income of the farmers' family, and income distribution of the coconut farmers' family based on their income sources.

This research was carried out in Gorontalo Regency. The method used in this research was field survey by interviewing one hundred coconut farmers as respondents. The respondents were selected using random sampling method at four villages from two districts as the representatives of the research location. The collected data were then analyzed by means of proportion and Gini Ratio analyses.

The result of the research showed that the income contribution of the farmers' family from coconut farm business was overall higher than other sources, namely 53.6% or Rp. 4,77 millions/years (Rp. 2.62 millions/ha). This was due to the fact that the coconut plants were spread over the area of Gorontalo Regency, friendly to environment and number of labors was adequate. The Gini Coefficient value for the income derived from: coconut business was 0.364, and from all farm enterprises were 0.329. Whereas, the total income derived from non-enterprises was 0.275. This indicated that the income derived from non-enterprises had been improving the income distribution of coconut farmers' family.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	11
1. Tujuan Umum	11
2. Tujuan Khusus	11
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Manfaat Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
A. Agribisnis Kelapa.....	13
1. Konsep Agribisnis	13
2. Kebijakan Pembangunan Agribisnis	20
B. Pendapatan Usahatani dan Penggunaan Faktor Produksi	28
1. Pendapatan Usahatani	28
2. Penggunaan Faktor Produksi	34
3. Alur Pikir Penelitian	40
C. Hipotesis	42

BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Metode Penelitian dan Jenis Data	43
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
D. Metode Penarikan Sampel	44
E. Metode Analisis Data	47
F. Defenisi Operasional Variabel.....	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Geografi.....	51
2. Keadaan Iklim.....	52
3. Jenis Tanah	52
4. Tata Guna Lahan	53
5. Keadaan Penduduk	54
6. Keadaan Tenaga Kerja	56
7. Keadaan Ekonomi	57
8. Keadaan Pertanian.....	59
a. Tanaman Padi-Palawija	60
b. Tanaman Sayuran	61
c. Tanaman Buah-buahan	63
d. Tanaman Perkebunan.....	64
e. Peternakan.....	65
B. Karakteristik Keluarga Petani Sampel	66
1. Umur Petani	67
2. Pendidikan	68
3. Pengalaman.....	69
4. Jumlah Tanggungan	70
5. Tenaga Kerja Produktif	71
C. Karakteristik Usahatani Kelapa	72
1. Luas Lahan	74
2. Usia Tanaman Menghasilkan	76

D. Kontribusi Sumber Pendapatan Keluarga Petani Kelapa	77
E. Distribusi Pendapatan Keluarga Petani Kelapa	81
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Nomor	halaman
1.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Tahun 1993 dan Tahun 2000	4
1.2. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Gorontalo	5
1.3. Keadaan Luas Tanaman Non Perkebunan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Tahun 2003	6
1.4. Luas Areal dan Produksi Kelapa di Kabupaten Gorontalo sampai dengan Tahun 2004.....	7
2.1. Perkembangan Areal dan Produksi Kelapa Indonesia Tahun 1968 sampai Tahun 2002.....	22
2.2. Dugaan Konsumsi Minyak Goreng Indonesia (dalam 000 ton)	23
2.3. Dugaan Produksi Minyak Goreng Indonesia (dalam 000 ton)	24
4.1. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Gorontalo, tahun 2003	53
4.2. Penggunaan Lahan Kering di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2003	54
4.3. Penduduk Kabupaten Gorontalo Menurut Kecamatan dari tahun 2002 – 2003 (orang)	55
4.4. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Gorontalo, tahun 2003	56
4.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001 – 2003 (Jutaan Rupiah)	58
4.6. Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi-Palawija di Kabupaten Gorontalo, 2003.....	60

4.7. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2003.....	62
4.8. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2003.....	63
4.9. Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2003.....	64
4.10. Keadaan Populasi Ternak di Kabupaten Gorontalo Tahun 2003	66
4.11. Umur Rata-rata Responden Petani Kelapa	67
4.12. Keadaan Pendidikan Responden Petani Kelapa	68
4.13. Pengalaman Responden Pada Usahatani Kelapa	69
4.14. Jumlah Tanggungan Petani Responden.....	70
4.15. Tenaga Kerja Produktif Keluarga Responden.....	71
4.16. Jumlah Pohon Kelapa dan Luas Lahan yang dimiliki Responden.....	75
4.17. Umur Rata-rata Tanaman Kelapa Menghasilkan yang dimiliki Responden.....	77
4.18. Kontribusi Pendapatan Keluarga Petani Kelapa dari Beberapa Sumber Selama Setahun	78
4.19. Proporsi Berbagai Sumber Pendapatan Keluarga Petani Selama Setahun	80
4.20. Angka Gini dan Pendapatan Rata-rata Keluarga Petani Kelapa di Kabupaten Gorontalo	81

DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
1. Mata Rantai Kegiatan Agribisnis	14
2. Alur Pikir Penelitian	41
3. Skema Tahapan Penarikan Sampel.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	halaman
1. Data Base Pendapatan Keluarga Petani Kelapa di Kabupaten Gorontalo	92
2. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani dari Usahatani Kelapa Saja Seluruh Wilayah Pengamatan.....	100
3. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani dari Usahatani Kelapa Saja Untuk Desa Ambara	101
4. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani dari Usahatani Kelapa Saja Untuk Desa Molopatodu.....	102
5. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani dari Usahatani Kelapa Saja Untuk Desa Tabongo Timur	103
6. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani dari Usahatani Kelapa Saja Untuk Desa Tabongo Barat.....	104
7. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan dari seluruh usahatani untuk semua Wilayah Pengamatan.....	105
8. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan dari seluruh usahatani untuk Desa Ambara	106
9. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan dari seluruh usahatani untuk Desa Molopatodu.....	107
10. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan dari seluruh usahatani untuk Desa Tabongo Timur	108
11. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan dari seluruh usahatani untuk Desa Tabongo Barat	109
12. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani Termasuk Non Usahatani Untuk semua Wilayah Pengamatan.....	110
13. Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani Termasuk Non Usahatani Untuk Desa Ambara	111

14.Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani Termasuk Non Usahatani Untuk Desa Molopatodu	112
15.Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani Termasuk Non Usahatani Untuk Desa Tabongo Timur	113
16.Perhitungan Gini Ratio Pendapatan Petani Termasuk Non Usahatani Untuk Desa Tabongo Barat.....	114
17.Peta Wilayah Kabupaten Gorontalo	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan sub-sektor perkebunan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai berbagai sasaran pertumbuhan ekonomi. Selain itu tujuan pembangunan sub-sektor perkebunan terkait erat dengan upaya pembangunan ekonomi rakyat, dengan tekanan orientasi pada peningkatan kesejahteraan, pemecahan kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat pembangunan. Perkebunan rakyat ditempatkan pada posisi tulang punggung pembangunan perkebunan dengan perkebunan besar milik BUMN dan swasta sebagai pendukung dan penunjang.

Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting dalam perekonomian nasional utamanya sebagai penghasil minyak nabati dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di samping sebagai komoditi ekspor. Menurut Warouw (1992) sejak awal perkelapaan di Indonesia umumnya merupakan sejarah pengorbanan petani tanpa tanda jasa. Saat itu petani diperintahkan atau diyakinkan untuk menanam kelapa untuk kepentingan petani tetapi ternyata hanya untuk kepentingan ekonomi kolonial. Pada waktu *orde baru* terlihat adanya kesungguhan untuk melihat petani kelapa sebagai subjek dan bukan sekedar sebagai kelas pekerja yang bekerja

keras dengan hasil yang tidak memadai. Keadaan ini diwujudkan dalam bentuk upaya pengembangan kelapa melalui berbagai kebijakan pemerintah.

Kelapa sebagai sumber minyak kelapa telah digunakan pula sebagai sumber lemak bagi manusia sejak berabad-abad yang lalu, menggantikan posisi kedudukan lemak hewani sebagai sumber lemak utama pada saat itu. Setelah di sadari bahwa produksi lemak hewani tidak akan dapat memenuhi konsumsi lemak yang meningkat akibat pertambahan penduduk sehingga sistem produksi lemak hewani tidak dapat diterapkan dalam skala yang luas dan berkesinambungan. Peranan minyak kelapa bagi manusia semakin meningkat setelah ditemukannya teknik pembuatan sabun dan margarin pada pertengahan abad 19, dan semakin besar pada awal abad 20 setelah bentuk pemanfaatannya berkembang tidak hanya sebagai bahan pangan seperti minyak goreng (bentuk cair), lemak pemasak (bentuk padat) atau *shortening* tetapi juga sebagai bahan baku industri berbasis oleokimia.

Peningkatan jumlah penduduk dan berkembangnya bentuk pemanfaatan minyak kelapa sebagai bahan baku industri menyebabkan terjadinya *booming* permintaan minyak kelapa dalam negeri dan luar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa mengambil langkah-langkah pengamanan pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan cara (1) menghentikan ekspor kopra, (2) memacu peningkatan produksi melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi, dan (3) mengembangkan kelapa sawit sebagai komoditas alternatif penghasil minyak goreng.

Pada masa krisis ekonomi tahun 1997 harga minyak goreng dapat melambung tinggi, sebagian besar minyak goreng yang beredar di Indonesia adalah minyak goreng yang berasal dari minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*) dan kelapa dalam (*crude coconut oil/CCO*). Tidak mengherankan jika harga komoditas minyak goreng selalu dipantau oleh pemerintah. Dampak dari langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah tersebut produksi minyak goreng (kelapa dan kelapa sawit) Indonesia meningkat, sementara itu peranan minyak kelapa sebagai minyak makan maupun komoditas ekspor mulai tergeser. Keadaan ini berlangsung sampai saat ini sehingga timbul keraguan akan prospek ekonomi minyak kelapa di Indonesia, yang diperparah lagi oleh adanya kampanye Anti Minyak Tropis (*Anti Tropical Oil Campaign*) dengan semboyan *No Tropical Oil* yang di motori oleh American Soybean Association (Baruwadi, 2002).

Masalah perkebunan kelapa rakyat secara nasional tersebut akan berdampak pada wilayah-wilayah yang mengandalkan kelapa, baik sebagai penyumbang PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu wilayah yang menjadikan kelapa sebagai sektor unggulan terutama dalam sub-sektor perkebunannya adalah Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan UU No. 38 tahun 2000. Struktur perekonomian Gorontalo sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia bertumpu pada sektor pertanian yang terdiri dari tanaman perkebunan dan non perkebunan. Dalam periode 1993 – 2000 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi

Gorontalo menurun dari 32,46 persen menjadi 30,16 persen sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. Untuk penyerapan tenaga kerja berdasarkan data Tabel 1.2, sektor pertanian di Provinsi Gorontalo pada tahun 2000 menyerap tenaga kerja sebesar 58,87 persen.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Tahun 1993 dan 2000

No	Sektor	PDRB (juta Rp)		Proporsi (%)		Pertumbuhan (%)
		1993	2000	1993	2000	
1	Pertanian	143.945	277.062	32,46	30,16	9,87
2	Pertambangan dan galian	13.115	37.633	2,96	4,10	16,25
3	Industri Pengolahan	48.192	99.358	10,87	10,81	10,89
4	Listrik, gas dan air bersih	2.956	6.155	0,67	0,67	11,05
5	Bangunan	27.205	66.380	6,13	7,22	13,59
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	55.869	152.916	12,60	16,64	15,47
7	Pengangkutan dan Komunikasi	41.113	80.396	9,27	8,75	10,05
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	26.946	43.681	6,08	4,75	7,14
9	Jasa-jasa	84.184	155.207	18,98	16,89	9,13
Jumlah/ rata-rata		443.520	155.207	100	100	10,97

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo (2001)

Wilayah pembangunan perkebunan Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2003 didasarkan pada luasan potensi wilayah perkebunan sebesar 180.011,80 ha atau 14,73 % dari luas wilayah daratan Provinsi Gorontalo. Dari luas potensi lahan tersebut baru seluas 79.031,68 ha atau 43 % yang telah dimanfaatkan dengan komoditi kelapa seluas 58.398,22 ha atau 73,89 %, dengan jumlah petani yang terlibat didalamnya adalah 27.894 kk. Realisasi produksi selama tahun 2003 sebesar 63.027 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 2.02

ton/ha, sedangkan untuk tahun 2004, sampai dengan bulan September 2004 sebesar 31,513 ton. Keadaan luas lahan tanaman perkebunan dan non perkebunan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Gorontalo

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Pekerja	Proporsi (%)
1	Pertanian	354.719	58,87
2	Industri	63.115	10,47
3	Pertambangan	8.516	1,41
4	Pemerintahan	38.995	6,47
5	Bangunan	10.705	1,78
6	Perdagangan	36.295	6,02
7	Angkutan	45.848	2,81
8	Jasa	13.033	7,61
9	Lain-lain	27.464	4,56
Jumlah		602.594	100

Sumber : Bapedda Provinsi Gorontalo (2001)

Keadaan perkelapaan yang di hadapi Gorontalo yang merupakan kendala bagi ekonomi perkelapaan di wilayah ini, adalah umur tanaman kelapa yang makin tua. Baruwadi (2002) menyebutkan bahwa luas pertanaman kelapa yang sudah tua di Provinsi Gorontalo mencapai sekitar 40 – 50 persen. Bahkan penelitian Hasni (1994) menyebutkan bahwa tanaman yang sudah berumur di atas 50 tahun mencapai 62 persen. Keadaan umur tanaman yang tua ini berpengaruh pada penurunan produktivitas kelapa di Gorontalo.

Tabel 1.3 Keadaan Luas Tanaman Non Perkebunan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Tahun 2003.

No	Potensi Pertanian	Luas (Ha)	Proporsi (%)
----	-------------------	-----------	--------------

	Tanaman Non Perkebunan	1970.909	100
1	Padi	48.013	2.44
2	Jagung	66.916	3.40
3	Palawija Lain	1855.98	94.17
	Perkebunan	79.031,68	100
4	Kelapa	58.398,22	73.89
5	Tebu	4.000,00	5.06
6	Kakao	3.871,40	4.90
7	Kemiri	3.601,83	4.56
8	Cengkeh	2.780,39	3.52
9	Jambu Mente	2.009,29	2.54
10	Kopi	1.287,75	1.63
11	Aren	876,86	1.11
12	Kapuk	842,30	1.07
13	Vanili	601,00	0.76
14	Pala	330,30	0.42
15	Casivera	326,88	0.41
16	Lain-lain	105,46	0.13

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo (2003)

Kabupaten Gorontalo yang merupakan wilayah dari Provinsi Gorontalo memiliki luas pertanaman kelapa terbesar jika dibandingkan dengan Kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo tahun 2004 bahwa luas areal tanaman kelapa di Kabupaten Gorontalo mencapai 27.654.9 Ha, dengan tingkat produksi 24.892.6 dan produktivitas mencapai 1.641 kg/ha, untuk lebih jelasnya data areal dan produksi kelapa di Kabupaten Gorontalo dapat di lihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Luas Areal dan Produksi Kelapa di Kabupaten Gorontalo sampai dengan Tahun 2004

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Jlh. Petani (KK)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
		TBM	TM	TT/TR	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tibawa	1.019.67	1.497.66	315.52	2.832.85	1.962	3.327.80	2.222
2	Pulubala	815.52	1.399.38	821.51	3.036.41	2.375	3.081.43	2.202
3	Limboto	671.90	271.70	74.80	1.018.40	1.120	380.38	1.400
4	Batudaa/Bongomeme	2.142.50	2.507.65	603.32	5.253.47	5.609	4.087.47	1.603
5	Batudaa Pantai	39.31	1.129.16	15.70	1.184.17	1.315	1.693.74	1.500
6	Telaga/Telaga Biru	733.18	904.73	144.35	1.782.26	1.973	1.402.33	1.550
7	Kwandang/Anggrek	754.20	2.369.90	693.65	3.817.75	1.664	3.002.66	1.267
8	Atinggola	1.496.89	1.622.91	411.84	3.531.64	3.175	2.629.11	1.620
9	Sumalata/Tolinggula	342.37	1.799.55	43.23	2.185.15	2.508	2.720.92	1.512
10	Boliyohuto/Mootilango/Tolanghula	839.05	1.699.83	473.91	3.012.79	3.347	2.566.74	1.510
Kabupaten Gorontalo		8.854.59	15.2025	3.597.8	27.654.9	24.508	24.892.6	1.641

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, 2004

Pada tingkat mikro keadaan perkelapaan sebagaimana yang digambarkan di atas berdampak pada pendapatan petani, di tambah lagi dengan masalah lapangan yang di hadapi petani kelapa di Kabupaten Gorontalo. Masalah tersebut adalah usahatani kelapa yang dicirikan oleh luas kepemilikan lahan yang kecil, diusahakan dalam bentuk usahatani kelapa monokultur dan status kepemilikan lahan. Selain itu kelembagaan pemasaran di pedesaan seperti KUD belum banyak berperan dalam peningkatan pendapatan petani kelapa. Masalah lain adalah keterkaitan petani sebagai produsen utama bahan baku kelapa dengan industri pengolahan belum menunjukkan kemitraan yang harmonis. Petani masih sebagai pihak yang menanggung resiko yang besar bila terjadi penurunan harga dan produk akhir yang dihasilkan pabrikan. Sebaliknya perubahan harga yang membaik pada sub-sistem hilir tidak berpengaruh terhadap perubahan harga di tingkat petani.

Kondisi yang diuraikan di atas menggambarkan keadaan yang kurang menguntungkan petani dalam usahatani kelapa. Raco dan Palar (1992) melaporkan hasil studinya bahwa petani kelapa sedang beroperasi pada keadaan biaya marjinal cenderung lebih besar dari penerimaan marjinal. Hal ini menyebabkan sarana produksi yang tersedia di tingkat petani seperti pupuk, herbisida, pestisida dan alat-alat pengolahan tidak terjangkau oleh petani kelapa mengingat lemahnya kepemilikan modal. Rendahnya pendapatan serta lemahnya kepemilikan modal pada tingkat petani menyebabkan pengelolaan usahatani kelapa masih sederhana dan belum melibatkan teknologi usahatani seperti pemupukan dan pestisida.

Menurut Sondakh (1993) tindakan petani kelapa tetap mengelola usahatani meskipun biaya marjinalnya melebihi penerimaan marjinal karena petani tidak punya pilihan. Mereka terjebak dalam perangkap ketergantungan (*dependency trap*) tanaman tahunan. Kalau harga rendah mereka tidak dapat lagi menebang tanaman kelapa untuk di ganti tanaman lain. Untuk menambah pendapatan keluarganya petani mencari tambahan pada pendapatan dari kegiatan di luar usahatani kelapa. Sumber pendapatan utama petani kelapa ternyata bukan hanya tergantung dari usahatani kelapa tetapi juga dari sumber lain, akan tetapi kelapa tetap memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 59 persen dari seluruh pendapatan petani.

Berbagai pernyataan di atas memerlukan suatu kajian komprehensif tentang peranan kelapa pada pendapatan petani. Secara mikro peranan kelapa di lihat dari ketergantungan petani pada usahatani kelapa berdasarkan kontribusi pendapatan usahatani kelapa terhadap total pendapatan keluarga petani pada usahatani kelapa.

Upaya mengkaji peran kelapa secara mikro yaitu kontribusi pendapatan usahatani kelapa dalam pendapatan keluarga petani digunakan model pendekatan ekonomi keluarga yang tergolong dalam Teori Ekonomi Mikro. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Vasilevitch Chayanov pada tahun 1920-an, dengan menganggap keluarga merupakan suatu unit ekonomi yang dapat bertindak sebagai konsumen dan sekaligus sebagai produsen.

Sebagai konsumen, keluarga akan memaksimalkan tingkat kepuasan melalui optimalisasi kegunaan (utility) dengan kendala utamanya adalah tingkat pendapatan keluarga itu sendiri. Sedangkan sebagai produsen, keluarga akan menghasilkan barang untuk kebutuhan sendiri dan untuk dipasarkan, dan keluarga akan memaksimalkan pendapatan dengan meningkatkan produktivitas atau menurunkan biaya produksi. Anggota keluarga yang berkehendak memperoleh pendapatan haruslah bekerja.

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas telah memberikan beberapa informasi penting tentang kondisi perkelapaan yang ada di Provinsi Gorontalo terutama di Kabupaten Gorontalo yang berhubungan dengan kontribusi pendapatan dari agribisnis kelapa pada pendapatan ekonomi keluarga petani kelapa.

Atas dasar pemikiran di atas, dilakukan pengkajian secara mikro peranan sub-sektor perkebunan kelapa terhadap pendapatan keluarga petani di Kabupaten Gorontalo. Secara spesifik rumusan permasalahan adalah :

1. Berapa besar kontribusi pendapatan yang diperoleh dari usahatani kelapa terhadap pendapatan keluarga petani ?
2. Bagaimanakah distribusi pendapatan keluarga petani berdasarkan sumber-sumber pendapatan keluarga.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan masalah penting yang akan di jawab melalui kegiatan penelitian ini.

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengkaji peranan subsektor perkebunan kelapa terhadap pendapatan keluarga petani di Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya kontribusi pendapatan yang diperoleh dari usahatani kelapa terhadap pendapatan keluarga petani.
2. Mengetahui distribusi pendapatan keluarga petani kelapa berdasarkan sumber-sumber pendapatan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan perbendaharaan terhadap dinas terkait dalam merencanakan kegiatan di subsektor perkebunan kelapa rakyat yang menjadi andalan pemerintah Kabupaten Gorontalo di sektor perkebunan yang dapat dijadikan indikator peningkatan ekonomi rakyat khususnya para petani kelapa dan keluarganya.

2. Kegunaan Penelitian

1. Guna Pengembangan Ilmu

Pada aspek pengembangan ilmu diharapkan penelitian ini dapat menjadi perbendaharaan kajian ilmu ekonomi regional khususnya tentang kontribusi agribisnis usahatani kelapa terhadap pendapatan keluarga petani. Selain itu diharapkan pula penelitian menjadi perbendaharaan kajian ilmu ekonomi mikro terutama yang berhubungan dengan pendapatan keluarga petani.

2. Guna Laksana

Pada aspek guna laksana diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah pada pemerintah Kabupaten Gorontalo, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya pembangunan sub-sektor perkebunan kelapa baik untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun kesejahteraan petani kelapa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Agribisnis Kelapa

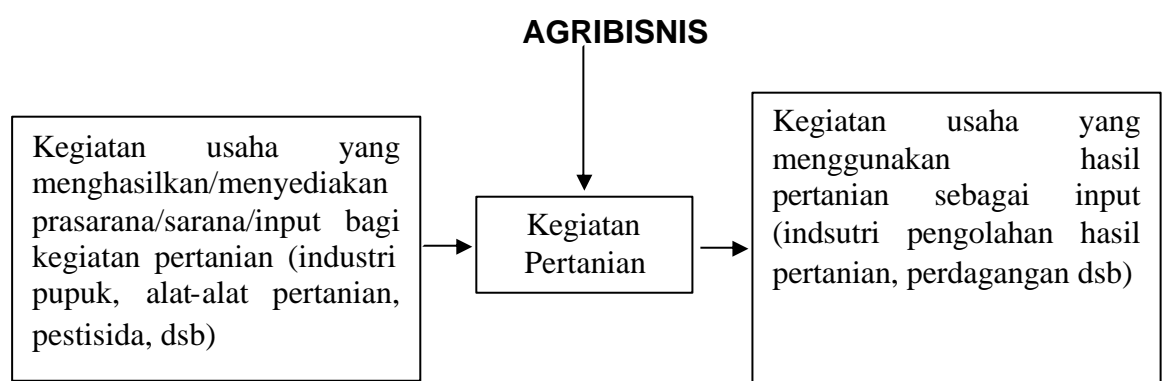
1. Konsep Agribisnis

Konsep agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Soekartawi (2003) mengemukakan bahwa agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Hubungannya dengan pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Saragih (2001) menyatakan bahwa pengembangan agribisnis ditujukan dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas yang menuntut adanya daya saing produk pertanian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga sektor pertanian mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat pada umumnya.

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan

landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan pertanian sebagai bagian pembangunan perekonomian nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralistik. Pada jangka menengah pembangunan pertanian diarahkan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pengembangan hubungan sinergi antara sub-sistem agribisnis, sedangkan dalam jangka pendek diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam upaya percepatan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Mata Rantai Kegiatan Agribisnis
(Soekartawi, 2003)

Sistem agribisnis merupakan suatu totalitas kesatuan kerja agribisnis yang terdiri atas (1) sub-sistem agribisnis hulu (*off-farm hulu*) berupa kegiatan input produksi, informasi dan teknologi, (2) sub-sistem usahatani (*on-farm*) berupa kegiatan produksi pertanian primer, (3) sub-sistem agribisnis hilir (*off-farm hilir*) berupa kegiatan pengolahan dan pemasaran, dan (4) sub-sistem

pendukungnya. Termasuk dalam sub-sistem hulu adalah industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian dalam arti luas seperti perbenihan, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian. Pembangunan pertanian selama ini lebih didominasi sub-sistem usahatani (*on-farm*), oleh karena itu fokus yang akan datang diarahkan kepada semua sub-sistem agribisnis (Saragih, 2001).

Nurland (2005) menyatakan bahwa perusahaan di sektor agribisnis yang akan mampu bersaing di pasar global dapat dilihat dari kinerja antar sub-sistem itu sendiri. Sejauh mana interaksi positif antara kegiatan sub-sistem penyediaan faktor produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil serta sub-sistem institusi-institusi sosial ekonomi telah terwujud? Apabila belum terwujud maka jangan diharapkan usaha sektor agribisnis akan mampu tampil tangguh dalam pasar skala global. Beberapa bukti empiris menunjukkan hal ini. Tidak jarang komoditi buah-buahan seperti mangga dan pisang di tolak konsumen internasional. Begitu pula komoditi ikan dan udang serta beberapa komoditi perkebunan dan kehutanan. Semuanya terjadi karena komoditi-komoditi tersebut tidak mampu dihasilkan dengan mutu yang tinggi, dengan harga yang wajar dan bersaing.

Upaya memaksimalkan daya saing perusahaan di sektor agribisnis melalui perbaikan yang terencana dan berkelanjutan terhadap proses produk, jasa, sumberdaya manusia dan lingkungan belum memperlihatkan hasil yang memadai. Semuanya baru berhenti pada tahap keinginan dan retorika politik. Dukungan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan penguatan modal (kredit),

penelitian dan pengembangan, teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia, serta perluasan jaringan pasar internasional belum tampak optimal. Hal demikian sudah cukup lama berlangsung. Karena itu tidaklah heran semuanya itu karena adanya kebijakan pembangunan yang “berat sebelah” selama lebih dari tiga dekade ini. Sektor industri sekunder (manufaktur) dan jasa semakin ditampikan sementara sektor pertanian semakin terpuruk; kurang mendapat perhatian serius (Nurland, 2005)

Selanjutnya Nurland (2005) mengemukakan bahwa kesadaran perlunya sektor pertanian, karena posisi dan perannya dalam pembangunan nasional semakin dirasakan ketika bangsa Indonesia terkena krisis moneter dan sekaligus krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. Hal ini terjadi karena hampir semua sektor industri yang sangat tergantung pada komponen impor sangat terpuruk. Hanya sekitar 20 persen saja yang diperkirakan masih bertahan. Tidak ayal lagi tingkat pertumbuhan di sektor ini mengalami penurunan sampai negatif. Hanya di sektor pertanian saja yang positif, itu pun hanya sekitar 0,26 persen (1998). Melihat fakta ini maka sangatlah wajar kalangan pengamat ekonomi dan politik banyak menaruh harapan pada sektor pertanian yang harus ditampikan sebagai sektor yang memimpin pembangunan ekonomi. Tetapi di sisi lain apakah kita sudah siap terutama untuk tampil di pasar global dengan mutu produk yang unggul.

Penampilan sektor pertanian sebagai “pemain utama” dalam pembangunan tidak saja hanya berorientasi pada produksi, lebih dari itu adalah pada kemampuan bersaing pada pasar global. Dengan kata lain, dalam

pasar global yang moderen, kunci itu meningkatkan daya saing adalah keunggulan tampil beda dalam hal mutu. Arti penting atau penekanan pada mutu ditunjukkan oleh berjayanya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Perancis. Bahkan di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand ternyata tampil lebih dahulu di pasar internasional dibanding Indonesia.

Konsep mutu secara spesifik pada sektor agribisnis sebagai kesatuan usaha dari seluruh komponen sub-sistemnya. Mutu itu sendiri banyak ragam kriteria yang di pakai dan bersifat dinamis serta berkelanjutan. Nurland (2005) berpendapat bahwa mutu diartikan sebagai ketepatan untuk di pakai dan orientasinya ditekankan pada pemenuhan harapan pelanggan. Pendekatannya merupakan proses arus atas ke bawah yaitu menekankan kesesuaian individual terhadap perkembangan persyaratan/tuntutan masyarakat. Hal ini ditekankan pada kondisi-kondisi faktual empiris dan cenderung berorientasi arus bawah ke atas. Artinya mutu dapat terus dikembangkan asalkan didukung oleh sumberdaya manusia bermutu.

Meskipun tidak ada satu defenisi yang di terima secara universal, namun ada unsur-unsur kesamaannya seperti : 1) mutu ditinjau dari sisi proses sebagai upaya memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2) mutu mencakup aspek-aspek proses, produk, jasa, manusia, dan lingkungan. 3) mutu memiliki karakteristik kondisi yang selalu berubah/dinamis sejalan dengan perubahan waktu dan dinamika sosial masyarakat. Dari batasan tersebut, mutu memiliki dua kata/kalimat kunci strategis yaitu (1) keistmewaan

produk yang memenuhi kebutuhan konsumen, dan (2) bebas dari defisiensi. Implikasi praktisnya dalam sektor agribisnis, antara lain adalah : 1) keistimewaan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen ; dimana mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk : a) meningkatkan kepuasan konsumen; misalnya dalam hal keamanan pangan, derajat kandungan air, kotoran, pencemaran, tampilan, daya tahan, estetika dan pelayanan. b) menjadikan produk terjual, misalnya tanpa hambatan proteksi, sistem distribusi lancar, dan dukungan informasi harga yang akurat. c) mampu menghadapi persaingan lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. d) mampu meningkatkan pangsa pasar dengan merek dagang nasional tanpa harus melalui pihak ketiga (perusahaan lain), nasional maupun internasional.

2). bebas dari defisiensi, dimana mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk : a) mengurangi tingkat kesalahan, baik pada subsistem produksi pengolahan, maupun pada subsistem pemasaran hasil. b) mengurangi pemborosan-pemborosan dalam hal penggunaan input, proses produksi dan pemasaran hasil. c) mengurangi kegagalan hasil dengan memperhatikan pemilihan kualitas input dan keunggulan teknologi proses yang didukung SDM yang bermutu. d) memperpendek waktu penempatan produk baru di pasar dengan cara pengembangan jaringan bisnis dengan dukungan sarana distribusi yang tangguh. e) mengurangi ketidak puasan pelanggan dengan cara mengidentifikasi dinamika kebutuhan pelanggan, preferensi dan daya beli pelanggan.

Berdasarkan uraian diatas, Nurland (2005) mengemukakan bahwa batasan mutu dapat dijabarkan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Apabila batasan mutu di atas dikaitkan pada keseluruhan sub-sistem agribisnis maka beberapa kata kunci/strategis dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

- 1) sub-sistem penyediaan input produksi, yaitu :
 - a) ketersediaan input baik dalam hal jumlah maupun kualitas serta tepat waktu yang sesuai dengan proses produksi (musiman).
 - b) ketepatan waktu antara masa produksi dan panen bahan baku dengan proses pengolahan.
 - c) optimalisasi lahan pertanian dan pengairan.
- 2) sub-sistem produksi yaitu ;
 - a) memperkecil kesenjangan antara produktivitas riil (lapangan) dan produktivitas potensial ; yang kini di Indonesia berkisar antara 20 sampai 100 persen ; dengan penerapan teknologi tepat guna.
 - b) penerapan teknologi dilakukan secara selektivitas, mempertimbangkan keragaman wilayah (lahan, agroekosistem dan kondisi sosial-ekonomi), serta tidak mencemari lingkungan misalnya dengan penerapan indegenous teknologi dan model pengendalian hama terpadu.
 - c) pemilihan komoditi pertanian yang berorientasi pada keunggulan/ketepatan sumberdaya lahan (*resource based*) serta permintaan pasar.
- 3) sub-sistem pengolahan, yaitu ;
 - a) memperkecil kehilangan dan kerusakan pasca panen, yang sementara ini masih berkisar antara 5 - 20 persen, melalui perbaikan teknologi panen dan pasca panen.
 - b) memperkecil kadar kontaminasi, kadar kotoran dan air, dan kadar keragaman mutu hasil pengolahan.
 - c) pengembangan pola peningkatan

mutu dan standardisasi hasil produksi sesuai dengan permintaan pasar. 4) sub-sistem pemasaran Hasil, yaitu ; a) menganalisis informasi potensi pasar antara lain melalui pendekatan intelijen bisnis. b) mengembangkan jaringan bisnis sampai ke pasar skala global ; atau pengembangan pangsa pasar potensial, c) mendayagunakan setiap komponen infrastruktur sistem distribusi hasil.

2. Kebijakan Pembangunan Agribisnis

Kebijakan pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis secara langsung membawa konsekuensi diperlukannya dukungan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan agribisnis dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agribisnis tersebut, diperlukan pengembangan sumber-sumber pembiayaan baik dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang telah ada.

Saragih (2001), menyatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dalam banyak komoditas perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, karet alam, kakao, teh, tembakau, kopi, lada dan lain-lain. Pembangunan sistem agribisnis dari komoditi perkebunan tersebut merupakan suatu bentuk dari industrialisasi perkebunan dengan mengembangkan 4 (empat) sub-sistem agribisnis perkebunan secara simultan dan harmonis. Keempat sub-sistem yang dimaksud adalah sub-sistem agribisnis hulu perkebunan seperti industri agro-otomotif, agro-kimia dan pembibitan tanaman perkebunan ; sub-sistem perkebunan atau usaha

budidaya perkebunan sub-sistem agribisnis hilir perkebunan yakni industri pengolahan komoditas perkebunan dan perdagangannya ; dan sub-sistem jasa penunjang agribisnis perkebunan yakni kegiatan yang menyediakan jasa bagi ketiga sub-sistem agribisnis perkebunan di atas seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perkreditan, transportasi, kebijakan ekonomi, dan lain-lain.

Di Indonesia tanaman kelapa diusahakan dalam tiga bentuk perusahaan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Tanaman kelapa merupakan tanaman tradisional yang diusahakan petani hampir di seluruh wilayah Indonesia baik di pekarangan maupun di kebun. Luas perkebunan kelapa di Indonesia ternyata sebagian besar adalah perkebunan rakyat. Pada tahun 2002, areal tanaman kelapa di Indonesia tercatat seluas 3.702 juta ha, didominasi oleh perkebunan rakyat (96,6 %) dan oleh perusahaan perkebunan besar (3,4 %). Perkembangan luas areal dan produksi kelapa di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perkembangan Areal dan Produksi Kelapa Indonesia Tahun 1968 sampai tahun 2002

Uraian	1968	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Luas Areal (000 ha)								
Perk. Rakyat	1.590	3,604	3,548	3,580	3,586	3,602	3,607	3,607
Perk. Besar Negara	0	28	28	25	15	14	14	14
Perk. Besar Swasta	5	104	93	101	78	81	81	81
Jumlah	1.595	3.736	3.668	3.706	3.679	3.697	3.702	3.702
Produksi (000 ton)								
Perk. Rakyat	1.131	2.687	2.620	2.690	2.904	2.951	3.023	3.098
Perk. Besar Negara	0	19	21	22	12	9	11	11
Perk. Besar Swasta	2	55	63	66	79	88	88	88
Jumlah	1.133	2.761	2.704	2.778	2.995	3.048	3.122	3.197

Sumber : Ditjen Bina Produksi Perkebunan, tahun 2003.

Dari tabel 2.1 tersebut terlihat bahwa perkembangan areal perkebunan kelapa telah meningkat dari 1,595 juta ha (1968) menjadi 3.702 juta ha (2002) dengan rata-rata 4 % per tahun dan produksi meningkat dari 1.131 juta ton (1968) menjadi 3,197 juta ton (2002) dengan rata-rata peningkatan 5 % per tahun. Dalam pengusahaan perkebunan kelapa tersebut sangat membutuhkan perhatian terutama untuk perkebunan kelapa rakyat yang masih bersifat *on-farm*, sehingga hal ini akan sangat berdampak pada pendapatan petani dan keluarganya (Baruwadi, 2004).

Perkembangan industri minyak goreng pada dasawarsa terakhir mengalami peningkatan sejalan dengan beralihnya pola konsumsi masyarakat dari minyak goreng kelapa ke minyak goreng kelapa sawit. Jakarta Futures Exchange (2005) memperkirakan konsumsi per kapita minyak goreng Indonesia mencapai 16,5 kg per tahun dimana konsumsi perkapita khusus untuk minyak goreng sawit sebesar 12,7 kg per tahun. Berdasarkan perkembangan berbagai variabel terkait seperti peningkatan konsumsi minyak goreng untuk keperluan rumah tangga maupun industri diperkirakan total konsumsi minyak goreng dalam negeri tahun 2005 mencapai 6 juta ton dimana 83.3% terdiri dari minyak goreng sawit. Perkiraan konsumsi minyak goreng di Indonesia sampai tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Dugaan Konsumsi Minyak Goreng Indonesia (dalam 000 ton)

Year	Palm Cooking Oil (CPO)	+/- (%)	Shares (%)	Coconut Cooking	+/- (%)	Shares (%)	Total	+/- (%)
------	------------------------	---------	------------	-----------------	---------	------------	-------	---------

				Oil (CCO)				
1999	2,494.1	4.4	77.5	725.8	7.5	22.5	3,219.9	5.1
2000	2,806.1	12.5	78.5	769.5	6.0	21.5	3,575.6	11.0
2001	3,137.9	11.8	79.6	806.5	4.8	20.4	3,944.4	10.3
2002	3,508.1	11.8	80.6	846.9	5.0	19.4	4,355.0	10.4
2003	3,964.9	13.0	81.8	879.8	3.9	18.2	4,844.7	11.2
2004	4,527.7	14.2	82.9	933.4	6.1	17.1	5,461.1	12.7
2005	5,062.8	11.8	83.8	980.4	5.0	16.2	6,043.3	10.7
Average Growth (%)		10.1			3.3			8.8

Sumber: Jakarta Futures Exchange-Prosentasing the Future, 2005.

Namun demikian dari 79 pabrik yang ada di Indonesia, belum semuanya memproduksi secara maksimal, baru sekitar 31 %. Produksi terbesar minyak goreng berada di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap produksi nasional sebesar 51.4%. Disusul dengan Sumatera sebesar 47.5% dan Kalimantan Barat 1.1%. Selain itu permasalahan yang lain adalah belum terintegrasinya produksi dalam satu sistem industri dari hulu ke hilir. Dugaan produksi minyak goreng di Indonesia sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Dugaan Produksi Minyak Goreng Indonesia (dalam 000 ton)

Year	Palm Cooking Oil (CPO)	+/- (%)	Shares (%)	Coconut Cooking Oil (CCO)	+/- (%)	Shares (%)	Total	+/- (%)
1999	2,598.4	12.5	77.3	763.9	6.0	22.7	3,362.4	11.0
2000	2,923.2	12.5	78.3	809.8	6.0	21.7	3,733.0	11.0
2001	3,303.2	13.0	79.4	858.4	6.0	20.6	4,161.6	11.5
2002	3,732.7	13.0	80.6	901.3	5.0	19.4	4,633.9	11.3
2003	4,217.9	13.0	81.7	946.3	5.0	18.3	5,164.2	11.4

2004	4,766.2	13.0	82.7	993.7	5.0	17.3	5,759.9	11.5
2005	5,385.8	13.0	83.8	1,043.3	5.0	16.2	6,429.2	11.6

Sumber: Jakarta Futures Exchange-Prosentasing the Future, 2005.

Baruwadi (2004) menyatakan bahwa pengembangan agribisnis kelapa sangatlah ditentukan oleh kesiapan semua perangkat sub-sistem dalam agribisnis kelapa tersebut, karena tanaman kelapa merupakan tanaman yang serbaguna dari bagian-bagiannya mulai dari ujung akar sampai ke ujung daun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan. Fungsi tanaman kelapa ini memungkinkan kelapa dapat menjadi bahan baku agroindustri yang berbasis kelapa, misalnya makanan dan minuman dari buah kelapa, berbagai keperluan rumah tangga dan souvenir dari tempurung, sabut kelapa dan tepung kelapa.

Hampir tiap bagian dari buah kelapa dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang mempunyai nilai komersial. Sabut kelapa dapat dipisahkan antara serat sabut dan serbuknya. Serat sabut antara lain berguna sebagai pengisi kasur/matras dan jok kursi serta tali, sedangkan serbuknya dapat dimanfaatkan untuk media tanam dan sebagai bahan baku untuk peralatan rumah tangga. Tempurung kelapa dapat di buat (tepung tempurung sebagai bahan baku untuk obat nyamuk), arang tempurung, serta *carbon active* yang bernilai tinggi. Daging buah kelapa dapat dihasilkan minyak kelapa dan bungkil kelapa, santan, *desiccated coconut* serta berbagai bahan untuk makanan lainnya. Sedangkan air kelapa merupakan minuman yang mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi dan dapat dipasarkan sebagai

minuman dalam kemasan, di samping itu air kelapa tersebut dapat digunakan untuk pembuatan *nata de coco*, cuka dan alkohol.

Pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten Gorontalo didasarkan pada faktor ekonomi dan kualitas pelaku pekebun yang bergerak di wilayah perkebunan kelapa di Kabupaten Gorontalo, menimbulkan adanya penurunan kapabilitas areal perkebunan kelapa seperti umur tanaman yang sudah tua, apabila tidak dilakukan segera upaya peremajaan, maka akan terjadi degradasi areal perkebunan kelapa di Kabupaten Gorontalo. Program pengembangan agribisnis perkebunan kelapa tertuju pada skala besar dan kurang menyentuh pemberdayaan masyarakat lokal. Skenario yang di tempuh adalah mencari kompromi dengan tetap memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, kewirausahaan bisnis pada skala ekonomi melalui pola-pola pengembangan berdasarkan potensi, populasi, ekonomi, serta kelembagaan di Kabupaten Gorontalo (Baruwadi, 2004).

Selanjutnya Baruwadi (2004) menyatakan bahwa masalah pengelolaan pembangunan agribisnis perkebunan kelapa dapat diatasi dengan 7 (tujuh) konsep pembangunan perkebunan yaitu "*seven diseases diagnose*" yang tujuannya untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. 1) kawasan, terhadap kawasan perkebunan kelapa di lapangan masih sering terjadi tumpang tindih kepentingan karena ketidakjelasan deliniasi batas. Akibatnya banyak keluhan dan saling serobot lahan. Di kawasan perkebunan kelapa Kabupaten Gorontalo sebagian besar model pengelolaannya adalah perkebunan rakyat. Oleh karena itu perlu segera dilakukan pemantapan kawasan dalam rangka

pemberian kepastian batas wilayah kawasan. 2) kelembagaan, kerangka kelembagaan, hukum, peraturan perundangan, keuangan dan fiskal di tingkat daerah lokasi perlu dikuatkan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan yang berkelanjutan. Model kelembagaan KUD (koperasi unit desa) dapat menjadi alternatif. 3) kuantitas, Kualitas dan kontinuitas, tiga kata yang sangat mendasar dalam pengembangan agribisnis perkebunan kelapa. Tingkat produksi, kualitas, serta keberlanjutan akan mempengaruhi pada tahapan *"off farm"*. Kecenderungan angka produksi, kualitas serta ketersediaan bahan baku yang menurun menjadi fokus pembangunan perkebunan kelapa. 4) Infrastruktur, ketersediaan dukungan infrastruktur antara lain ; jaringan jalan, pelabuhan, pabrikan, alat dan mesin, pengelolaan sumber air, sarana penjualan saprodi, dan pemukiman yang menggambarkan pelaku : sangat mempengaruhi pembangunan agribisnis perkebunan kelapa. 5) keterbatasan sumberdaya manusia, model pengelolaan pembangunan agribisnis pekebunan kelapa juga dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelakunya. Rendahnya pengetahuan, kemamuan dan kemampuan dalam pengelolaan kebun kelapa berkelanjutan menjadi kendala dalam pembangunan perkebunan kelapa. 6) keterbatasan modal, pada umumnya hanya satu modal yang di miliki masyarakat pekebun yaitu tenaga dan alat sederhana. Kemampuan untuk mengembangkan modal infestasi tidak dipunyai bahkan upaya pasca panen berkaitan dengan pemasaran hasil, sangat tergantung pada para pembeli. Nilai tawar rendah, modal investasi tidak memadai, sarana lembaga keuangan (perbankan) terbatas. Pola bantuan

melalui kredit mengalami hambatan dalam pengembalian (balduit). 7) jaringan pasar, hasil produksi hanya di lempar ke pasar lokal jadi sangat bersifat tergantung. Peluang pasar luas belum tentu terbentuk. Pasar Lemah, timbunan produksi meningkat, sehingga di samping kualitas menurun, karena produk rusak, juga harga penawaran turun.

B. Pendapatan Usahatani dan Penggunaan Faktor Produksi

1. Pendapatan Usahatani

Konsep pembangunan yang menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi semakin gencar mendapat sorotan sejak tahun 1970-an karena di nilai telah gagal memberantas dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang semakin meluas di masyarakat. Para ekonom menyadari bahwa peningkatan dalam pendapatan dalam per kapita belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan. Kesadaran ini melahirkan berbagai pandangan tentang cara-cara mengukur distribusi pendapatan (Olilingo, 2002).

Menurut Michael P. Todoro (1994) *dalam* Olilingo, (2002) menyatakan bahwa umumnya para ahli ekonomi membedakan konsep distribusi pendapatan atas 1) distribusi pendapatan perorangan atau antar kelompok ; dan 2) distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan berdasar atas harga-harga faktor produksi.

Cornelis, R. (1995) *dalam* Olilingo, (2002) menyatakan bahwa konsep distribusi pendapatan perorangan atau kelompok digunakan untuk mengukur besaran pendapatan yang di terima masing-masing individu atau kelompok. Konsep ini menggunakan penghasilan masing-masing individu tanpa mempertimbangkan dari mana penghasilan itu diperoleh misalnya dari balas jasa tenaga kerja, sewa, bunga dan keuntungan. Demikian juga apakah penghasilan ini berasal dari perkotaan atau pedesaan, berasal dari sektor pertanian, perindustrian, jasa dan lain-lain.

Sedangkan konsep distribusi fungsional adalah sumbangan dari para ahli ekonomi klasik yang melacak pembangian pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi yang diikutsertakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Perangkat analisisnya adalah fungsi produksi serta alokasi-alokasi faktor-faktor produksi yang diikutsertakan dalam fungsi. Karena hubungan antara balas jasa input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dalam proses produksi adalah spesifik, maka pendekatan ini lebih jarang digunakan bila dibandingkan dengan pendekatan distribusi pendapatan antar kelompok.

Karakteristik usahatani kelapa di Indonesia di dominasi oleh perkebunan tanaman kelapa rakyat, menurut Tarigan (2002) usahatani perkebunan kelapa rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Luas kepemilikan lahan usahatani sangat sempit, rata-rata 0,5 ha per keluarga petani. Pola kepemilikan lahan yang sempit ini akan menjadi lebih sempit sebagai akibat fragmentasi lahan yang tidak dapat dibendung sejalan dengan budaya bangsa Indonesia, 2) Umumnya diusahakan dalam pola monokultur, 3) Produktivitas usahatani kelapa masih rendah rata-rata 1.1 ton *equivalent* kopra per hektar per tahun, 3) Pendapatan usahatani persatuan luas masih rendah dan fluktuatif sehingga tidak mampu mendukung kehidupan keluarga petani kelapa secara layak, 4) Adopsi teknologi anjuran sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman dan usahatani masih rendah, karena kemampuan petani dari segi pemilikan modal tidak menunjang, 5) Produk usahatani yang dihasilkan masih bersifat tradisional yaitu berbentuk kelapa butiran dan kopra yang berkualitas sub standar dan tidak kompetitif. Dengan

ciri-ciri tersebut, tingkat pendapatan petani kelapa menjadi rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa adalah dengan meningkatkan nilai tambah dari produk yang selama ini di jual oleh petani dalam bentuk kelapa butiran ataupun kopra menjadi produk minyak kelapa yang dikelola sendiri oleh petani. Tingkat harga minyak kelapa yang lebih tinggi dari produk kelapa butiran atau kopra akan menghasilkan tambahan penghasilan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Selanjutnya, (Barri, 2003) Mengemukakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa dapat diterapkan program usahatani kelapa polikultur, karena program ini sesuai untuk pertanaman kelapa sebagai salah satu komoditi ekspor sub sektor perkebunan yang hampir dilupakan saat ini. Sasaran utama dari program usahatani kelapa polikultur adalah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan di pertanaman kelapa pada satu luasan (spatial) dan waktu (temporal) tertentu.

Kendala utama peningkatan pendapatan petani kelapa saat ini adalah masih kentalnya kebiasaan membudidaya kelapa untuk tujuan usahatani monokultur. Hal tersebut terlihat dari masih digunakannya jarak dan sistem tanam kelapa konvensional yang diterapkan. Padahal, dengan cara ini fleksibilitas menerapkan pola usahatani polikultur menjadi sangat terbatas. Iklim mikro, terutama ketersediaan radiasi surya yang layak untuk tanaman sela tidak akan tersedia untuk semua tingkatan umur dengan sistem tanam kelapa yang diterapkan saat ini, sehingga ada waktu-waktu tertentu pola

usahatani polikultur tidak dapat diterapkan secara maksimal dan ini tentunya mengganggu jaminan keberlanjutan pendapatan petani kelapa. Teknologi jarak dan sistem tanam baru kelapa yaitu 5 x 16 m atau 6 x 16 m empat persegi (sistem pagar) pada program peremajaan kelapa sangat tepat untuk mendukung pola usahatani polikultur.

Program peremajaan yang sedang dan akan terus dilanjutkan di Indonesia sebagai upaya meningkatkan produksi tanaman kelapa akan lebih berhasil jika memberikan jaminan peningkatan pendapatan bagi petani peserta program ini. Kemungkinan keberhasilan tersebut akan lebih nyata jika program ini dikombinasikan dengan menerapkan teknologi jarak dan sistem tanam baru kelapa dengan berwawasan tanaman campuran (polikultur).

Menurut (Barri, 2003) bahwa dari hasil pengujian lapang menyimpulkan bahwa usahatani polikultur secara agronomis tidak mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa. Selanjutnya, secara ekonomis, usahatani semacam ini justru meningkatkan pendapatan petani dibanding usahatani kelapa monokultur. Hasil simulasi analisis finansial dan uji sensitivitas terhadap beberapa pola tanam tanaman sela di program ini menunjukkan bahwa secara finansial pola usahatani polikultur layak untuk dikembangkan dengan nilai IRR > 100 dan Benefit Cost Ratio (BCR) > 1.5. Sedangkan uji sensitivitas menunjukkan bahwa tiga pola kombinasi tanaman sela yang akan diterapkan sebagai salah satu komponen usahatani polikultur lebih rentan terhadap terjadinya penurunan harga dan

produk hingga 25%. Dengan kata lain, terjadinya penurunan tingkat produksi atau penurunan harga hingga 25% tidak akan terlalu mempengaruhi tingkat pendapatan petani, dimana pola yang diterapkan masih dapat memberikan keuntungan bagi petani pelaksana pola ini. Kesimpulan umum yang dapat diambil bahwa pendapatan petani kelapa dijamin akan berkelanjutan jika program peremajaan yang akan diterapkan menerapkan jarak dan sistem tanam baru kelapa disertai dengan usahatani polikultur.

Dari segi mikro peranan kelapa dapat di kaji dengan melihat seberapa besar ketergantungan petani terhadap komoditas ini dilihat dari pendapatan keluarga petani. Kasryno, dkk (1988) mengemukakan bahwa sumber pendapatan keluarga petani dapat dikelompokkan menjadi pendapatan dari usahatani, non usahatani, dan luar sektor pertanian seperti buruh industri, pengrajin, berdagang dan sebagainya. Pendapatan petani kelapa selain bersumber dari usahatani kelapa, juga berasal dari pendapatan usahatani di luar kelapa dan pendapatan yang berasal dari usaha di luar pertanian.

Keragaman sumber pendapatan ini terjadi karena masing-masing anggota keluarga mempunyai lebih dari satu macam jenis kegiatan. Keragaman sumber pendapatan keluarga, berkaitan erat dengan kegiatan masing-masing anggota keluarga, kesempatan kerja yang tersedia, dan penguasaan faktor produksi atau aset keluarga.

Pendapatan keluarga petani merupakan penjumlahan semua pendapatan dari berbagai sumber yang ada selama satu tahun. Nurmanaf

(1988) *dalam* Ismono (2000) merumuskan secara sederhana struktur pendapatan petani melalui persamaan sebagai berikut :

$$I = \sum P_i + \sum NP_j$$

Dimana : I = total pendapatan keluarga

P_i = pendapatan dari usaha sektor pertanian ke-i (i = 1,2,3.....)

NP_j = pendapatan dari usaha di sektor luar pertanian ke-j

(j = 1,2,3,.....)

Sumber-sumber pendapatan petani tersebut biasanya ; dari sektor pertanian terdiri dari (1) usahatani padi sawah, (2) usahatani tanaman semusim selain padi, (3) usahatani di pekarangan dan tanaman tahunan, (4) usaha peternakan, (5) usaha perikanan, (6) kegiatan buruh tani, dan (7) jasa tanah. Sumber pendapatan dari sektor luar pertanian adalah ; (1) perdagangan, (2) usaha angkutan, (3) industri rumah tangga, dan (4) kegiatan berburuh di luar pertanian.

Selanjutnya Ismono (2000) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga petani adalah asset non-lahan, angka kerja di atas 10 tahun dan umur kepala keluarga. Faktor-faktor tersebut hubungannya negatif terhadap tingkat pendapatan. Kontribusi sektor pertanian terhadap struktur pendapatan keluarga sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas mereka terhadap penguasaan faktor produksi terutama modal dan keterampilan.

2. Penggunaan Faktor Produksi

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa, dalam menunjang keberhasilan agribisnis, maka tersedianya bahan baku pertanian secara kontinyu dalam jumlah yang tepat sangat diperlukan. Tersedianya produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain macam komoditi (X_1), luas lahan (X_2), tenaga kerja (X_3), modal (X_4), manajemen (X_5), iklim (X_6) dan faktor sosial ekonomi produsen (X_7). Secara matematis, pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dilihat bahwa besar-kecilnya produksi sangat tergantung dari peranan X_1 sampai dengan X_7 dan faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut. Namun patut diperhitungkan bahwa besar-kecilnya Y juga sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat mengingat sifat pertanian yang adaptasinya tergantung pada kondisi setempat (*local specific*).

Faktor produksi (*production factor/input*) adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Dari berbagai pengalaman usahatani menunjukkan bahwa faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting di antara faktor produksi lainnya. Hubungan antara faktor produksi (*input*) dan produksi (*output*) biasanya disebut dengan fungsi produksi atau

factor relationship (Soekartawi, 2003). Faktor-faktor produksi dalam pertanian yang dapat menunjang produksi dan pendapatan petani adalah :

1. Faktor produksi lahan

Lahan pertanian banyak diartikan sebagai tanah yang disiapkan untuk usahatani, misalnya sawah, tegal dan pekarangan (Soekartawi, 2002). Lahan pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam usahatani yang dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Luas lahan usahatani sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi usahatani, karena semakin luas lahan usahatani maka produksi dari usahatani akan meningkat apabila ditunjang oleh teknik budidaya tanaman yang baik dan benar. Lahan usahatani khususnya untuk tanaman perkebunan kelapa di Kabupaten Gorontalo umumnya masih dikuasai oleh negara dalam bentuk HGU (hak guna usaha) yaitu 65 % sedangkan milik rakyat hanya 35 % dari total luas perkebunan kelapa di Kabupaten Gorontalo.

2. Faktor produksi tenaga kerja

Faktor produksi tenaga kerja merupakan salah satu aspek produksi yang menentukan dalam operasional usahatani, hal pokok yang perlu diperhatikan dalam faktor produksi tenaga kerja adalah volume kerja, kualitas kerja dan macam tenaga kerja yang akan sangat berhubungan dengan tingkat pemberian upah/gaji dari hasil kerja yang telah dilaksanakan dalam suatu proses produksi usahatani (Soekartawi, 2002).

Tenaga kerja dapat melaksanakan fungsinya dalam proses produksi usahatani berdasarkan luas lahan usahatani dan sumberdaya manusia dari

tenaga kerja tersebut. Nurland (2005), mengemukakan bahwa jika dibandingkan dengan faktor produksi lainnya, sumber daya manusia (SDM) memiliki keunikan yang dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1) intuisi dan emosi: artinya sebagai potensi makhluk hidup, manusia tidak dapat diperlakukan seperti faktor produksi lainnya yang hanya bersifat pasif saja. Sementara manusia dengan potensinya (SDM) memiliki ciri perasaan yang mendalam jika diperlakukan tidak wajar. 2) kepribadian aktif: artinya tiap manusia cenderung ingin meraih kinerja semaksimal mungkin. 3) kinerja manusia merupakan fungsi dari tingkat kemampuan, sikap dan derajat motivasinya. 4) manusia memiliki tiga tahap pengembangan individu yaitu (a) tahap ketergantungan (dependensi) terhadap orang lain. Pada tahap ini manusia memiliki paradigma “engkau”, (b) Tahap kebebasan (independensia) dimana individu mempunyai kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Pada tahap ini paradigma “aku”. (c) tahap dimana individu berada dalam kondisi saling ketergantungan (interdependensi).

Nurland (2005), menyatakan bahwa berkaitan dengan keunikan dari SDM di atas dibanding dengan faktor produksi lainnya maka untuk mampu mengembangkan sektor agribisnis (sebagai mesin perekonomian nasional) maka beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi : 1) tidak semua kualitas SDM memiliki kualitas unggul. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan mereka yang sebagian besar atau sekitar 70% antara tamat dan tidak tamat sekolah dasar. Hal ini akan semakin jelas manakala terlihat kualitas mereka berdasarkan pada setiap sub-sistem agribisnis; terutama pada

sub-sistem pengolahan dan pemasaran hasil. 2) produktivitas kerja di sektor agribisnis relatif lebih rendah dibandingkan di sektor non agribisnis khususnya di sektor industri manufaktur dan jasa. 3) masih terjadinya keragaman yang tinggi dalam kualitas SDM menyebabkan kualitas produk pada setiap sub-sistem akan beragam pula. Karena itu diperlukan sebuah proses integrasi vertikal mulai dari tahap hulu sampai hilir dengan dukungan SDM berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut dengan kata lain kinerja akhir agribisnis sebagai sebuah sistem yang total sangat dipengaruhi oleh "*team work*" yang handal dari pelakunya. 4) pemahaman dan penguasaan wawasan agribisnis oleh setiap SDM belum merata di setiap komoditi yang diusahakan. Padahal dalam menghadapi era globalisasi SDM yang dituntut adalah tidak sekedar yang memiliki kemampuan pada sub-sistem produksi saja. Secara ideal setiap pelaku seharusnya memiliki wawasan perilaku mikro, perilaku makro, bahkan perilaku global dalam suatu perusahaan. Dengan demikian kinerja pada setiap sub-sistem akan dicirikan berapa jauhnya optimalisasi yang merupakan garis produksi yang harmonis dan konvergen menyumbang kinerja akhir sistem agribisnis.

3. Faktor produksi modal

Faktor produksi modal dalam proses usahatani dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu ; modal tetap dan modal tidak tetap (biaya variabel). Faktor produksi seperti tanah, bangunan dan mesin pertanian sering dimasukkan dalam kategori modal tetap (biaya tetap) yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses

produksi. Sedangkan modal tidak tetap atau modal variabel (biaya variabel) adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang habis dalam satu kali proses produksi. Misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, pestisida dan upah tenaga kerja.

4. Manajemen

Dalam usahatani modern, peranan manajemen menjadi sangat penting. Manajemen dapat diartikan merencanakan, mengorganisasi dan melaksanakan serta mengevaluasi suatu proses produksi (Soekartawi, 2002). Manajemen dalam usahatani perkebunan kelapa biasanya melibatkan sejumlah orang (tenaga kerja) dari berbagai tingkatan, maka manajemen dalam usahatani kelapa berarti pula bagaimana mengelola tenaga kerja dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi.

Peranan manajemen dalam usahatani sangat menentukan kearah mana usahatani tersebut akan dibawa. Dalam bidang perkebunan kelapa faktor produksi manajemen sangat diperlukan untuk merencanakan potensi dan produksi kelapa secara berkelanjutan yaitu ; perencanaan budidaya yang menitikberatkan pada aspek peremajaan tanaman kelapa, penguasaan teknologi pengolahan kelapa secara sistematis dan berkelanjutan, penguasaan pasar global untuk produk turunan kelapa (*CPO* dan *CCO*) serta perencanaan sumberdaya manusia yang akan berperan dalam agribisnis kelapa.

Dalam proses produksi diperlukan sejumlah faktor produksi tertentu. Didalam usahatani kelapa faktor produksi yang digunakan selain tanah adalah

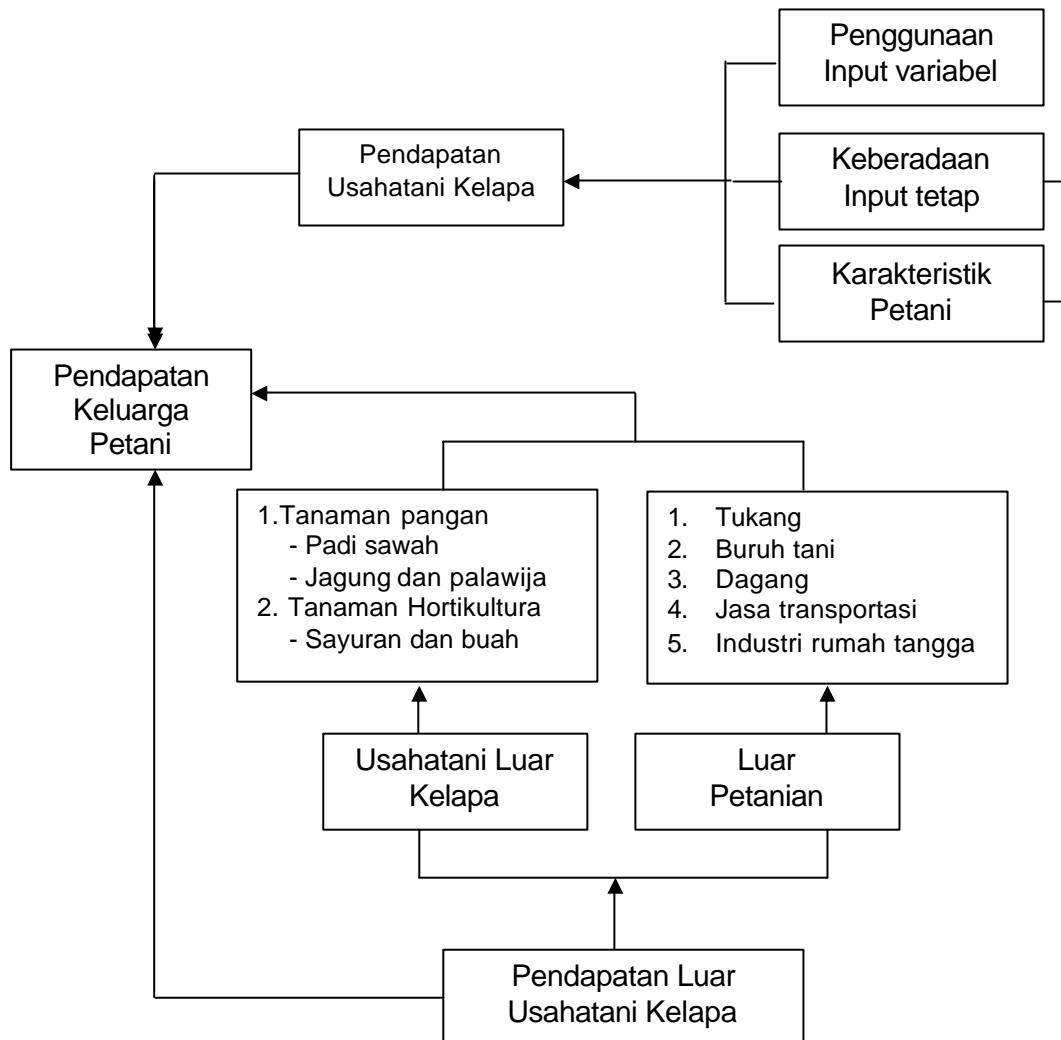
bibit/benih, pupuk, obat-obatan serta jumlah tenaga kerja. Selain faktor produksi tersebut dalam usahatani kelapa juga digunakan biaya produksi yang merupakan nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. Biaya produksi yang digunakan terdiri dari sewa tanah, bunga modal, biaya sarana produksi untuk bibit/benih, pupuk dan obat-obatan serta jumlah tenaga kerja (Soekartawi, 2003).

Penggunaan berbagai faktor produksi dan besarnya biaya produksi dalam usahatani dapat dinilai dari total pendapatan usahatani. Total pendapatan adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam suatu proses produksi ($p = TR - TC$). Sedangkan perbandingan antara total penerimaan dan total biaya dalam usahatani di analisis dengan menggunakan *R/C ratio*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah usahatani memberikan keuntungan terhadap pendapatan keluarga petani atau tidak.

3. Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan alur pikir dari penelitian ini sebagaimana tersaji pada Gambar 2. yang digunakan dalam pengajuan hipotesis penelitian bahwa, kontribusi pendapatan agribisnis kelapa pada pendapatan keluarga petani dapat dipengaruhi oleh pendapatan dari usahatani kelapa, pendapatan usahatani luar kelapa dan pendapatan dari luar pertanian. Pendapatan keluarga petani kelapa ini ditentukan oleh penggunaan: 1) input variabel yaitu ; benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja. 2) input tetap yaitu ;

modal usahatani, lahan, peralatan (mesin pertanian) dan 3) karakteristik petani yaitu ; umur, pendidikan, pengalaman berusahatani kelapa dan jumlah tanggungan keluarga.



Gambar 2. Alur Pikir Penelitian

C. Hipotesis

Selanjutnya dari alur pikir tersebut, dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- 1) Kontribusi pendapatan keluarga petani yang berasal dari usahatani kelapa masih lebih tinggi daripada sumber pendapatan lainnya.
- 2) Adanya sumber pendapatan lain dari usahatani kelapa dapat memperkecil ketimpangan pendapatan keluarga petani dari agribisnis kelapa.